

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di era reformasi, tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Pembaharuan sistem keuangan daerah tersebut dimaksudkan agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*). Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterima pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai

laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang di capai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam pengelolaan keuangan daerah harus mengacu pada aturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan terakhir telah di revisi dengan Permendagri No.59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai pertanggung jawaban penggunaan anggaran daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan , menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Sihombing,2011;4).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan yang harus dibuat oleh masing-masing SKPD terdiri dari; 1)Laporan realisasi anggaran, 2)Neraca ,3)Laporan arus kas ,4)Catatan atas laporan

keuangan (CALK), 5)Laporan Operasional, 6)Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 7)Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu , nilai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan. Dimana para pengguna laporan keuangan daerah adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), badan pengawas keuangan, investor, kreditor dan donator, analis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah,rakyat menjadikan laporan keuangan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi (Abdul Halim; 4).

Laporan keuangan merupakan media bagi seluruh entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyediakan laporan keuangan yang mengandung informasi yang berkualitas dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah,bahkan organisasional tentang pemerintahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/

penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar.

Ketidakhahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dan menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam jabatan.

Apabila informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 64 tahun 2013, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk itu, diperlukan adanya sistem pengendalian intern (SPI) yang memadai. Sistem pengendalian intern (SPI) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 menyatakan bahwa Pengendalian Intern meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan

catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan asset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Jika penerapan sistem pengendalian intern (SPI) tidak berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan sistem pengendalian intern (SPI) tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan, tidak sekedar menyampaikan ke DPRD saja, tetapi juga menyediakan fasilitas kepada masyarakat secara luas agar laporan keuangan dapat diperoleh dengan mudah. Aksesibilitas dapat diartikan sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik secara terbuka dan jujur berupa laporan keuangan yang dapat di akses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Penelitian Ratna Amalia Safitri (2009) tentang penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah ( studi empiris di Kabupaten Semarang) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap

penggunaan informasi keuangan daerah dan aksesibilitas berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Penelitian Himmah Bandary (2011) tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah ( studi pada kabupaten Eks Karasidenan Banyumas) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Penelitian Desi Indria Sari (2012) tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi terhadap nilai informasi keuangan pemerintah daerah (Studi Pada Kota Palembang dan Kabupaten Organ Ilir) menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi keuangan namun pengendalian internal berpengaruh terhadap nilai informasi keuangan daerah.

Penelitian Sanjaya, dkk (2014) tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, sumber daya manusia, pengendalian internal dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, sumber daya manusia, pengendalian internal dan aksesibilitas berpengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan daerah..

Penelitian Desi Ratna Sari (2015) tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, sumber daya manusia (SDM), pengendalian internal dan aksesibilitas terhadap penggunaan laporan keuangan daerah ( studi kasus pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan

daerah, pengendalian internal dan aksesibilitas berpengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan daerah, namun kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan daerah.

Penelitian Rusiana (2015) tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Kampar menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian dan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Desi Ratna Sari (2015) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya dilakukan pada SKPD di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tahun 2015 sedangkan penelitian ini akan dilakukan pada SKPD di Kota Padang Provinsi Sumatra Barat tahun 2017.

Alasan memilih Pemerintah Kota Padang sebagai objek penelitian ini karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang telah disampaikan, Kota Padang Sumatra Barat tahun 2014 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014. Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh

Pemerintah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang perlu mendapat perhatian, antara lain Data Peserta Asuransi Kesehatan Sumbar Sakato TA 2014 Tidak Valid dan akurat; Dana Kompensasi PT Rajawali Corp belum memberikan manfaat bagi Pengembangan Komunitas Masyarakat Sumatera Barat; Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum menetapkan kebijakan perlakuan atas daerah irigasi dan ruas jalan yang bukan menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya; Struktur dan Tarif Pemungutan Retribusi Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat Belum Diatur dengan Peraturan Daerah. .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia (SDM), Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas terhadap Penggunaan Laporan Keuangan Daerah pada SKPD di Kota Padang”**.

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan laporan keuangan daerah?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap penggunaan laporan keuangan daerah?



3. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap penggunaan laporan keuangan daerah?
4. Bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan laporan keuangan daerah?

### **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, sumber daya manusia (SDM), pengendalian internal, dan aksesibilitas secara signifikan terhadap penggunaan laporan keuangan daerah.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan koreksi dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi Pihak Organisasi atau SKPD Kota Padang , hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman serta bahan pertimbangan berkaitan dengan Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Pada SKPD Kota Padang dalam menyediakan informasi yang mungkin diperlukan untuk penelitian dibidang akuntansi sektor publik pada masa yang akan datang.

3. Untuk DPRD sebagai pengguna utama laporan keuangan mendorong agar lebih menyadari pentingnya laporan keuangan daerah sebagai alat untuk mengawasi pengelolaan sumber daya pemerintah daerah dan menilai kinerja keuangan pemerintah secara lebih baik lagi.
4. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan pengelolaan laporan keuangan daerah.
5. Bagi Peneliti  
Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam hal akuntansi khususnya pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, sumber daya manusia (SDM), pengendalian internal, dan aksesibilitas terhadap penggunaan laporan keuangan daerah.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam hal ini disusun menjadi enam bab dan diberi penjelasan dalam masing-masing sub yang terdiri atas:

**BAB I :** Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II :** Dalam bab ini merupakan landasan teori-teori yang terdiri dari pengertian penyajian laporan keuangan daerah, sumber daya manusia (SDM), pengendalian internal dan aksesibilitas terhadap penggunaan laporan keuangan daerah.

- BAB III :** Dalam bab ini dijelaskan definisi operasional yang mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel–variabel dalam penelitian. Metode analisis mendeskripsikan jenis atau model analisis yang digunakan dalam penelitian.
- BAB IV :** Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum pada pemerintah kota Padang mengenai pengetahuan penyajian laporan keuangan daerah, sumber daya manusia (SDM), pengendalian internal dan aksesibilitas terhadap penggunaan laporan keuangan daerah.
- BAB V :** Dalam bab ini akan dibahas hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, sumber daya manusia (SDM), pengendalian internal dan aksesibilitas terhadap penggunaan laporan keuangan daerah.
- BAB VI :** Penutup yang merupakan kesimpulan dan saran